

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG PELANGI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BANJARBARU

Noor Maulida¹, Sitna Hajar Malawat², M. Agus Humaidi³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63101, Fisip, Uniska, NPM. 19 12 0158

²Ilmu Administrasi Publik, 63101 Fisip, Uniska, NIDN. 11 1305 9101

³Ilmu Administrasi Publik, 63101 Fisip, Uniska, NIDN. 11 1808 8901

Email: noormaulida22477@gmail.com, sitna.shm@gmail.com,
humaidimhammadagus@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum, faktor penghambat serta faktor pendukung implementasi kebijakan Program Kampung Pelangi dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Banjarbaru. Menggunakan metode penelitian pendekatan Kualitatif, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi secara langsung serta melakukan wawancara kepada 5 orang informan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang pada umumnya bersifat subjektif.

Hasil penelitian sudah berjalan dengan baik berdasarkan teori George Edward III, dengan indikator empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Adapun faktor penghambat yaitu pengusulan disetujui setelah dilakukan berkali kali, adanya kelompok provokator dari penolak program, kurangnya partisipasi masyarakat menjaga fasilitas saat covid-19, serta terdapat wilayah yang meminta ganti rugi terlalu tinggi. Lalu faktor pendukungnya yaitu adanya dana sebesar 5 ratus juta lebih dengan kelompok kerja dari beberapa dinas terkait, mendapat bantuan dari tim CSR ,APBD, Bank Kalsel, Komunitas mural Banjarbaru, dan perusahaan cat PT Indaco.

Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan program ini, pada akhirnya Program Kampung Pelangi dalam penanganan permukiman kumuh berjalan dengan baik dan memberikan tempat yang jauh lebih layak untuk masyarakatnya. Selain itu, Program Kampung Pelangi juga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar sehingga membuat keadaan ekonomi masyarakatnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.

**Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Kampung Pelangi,
Permukiman Kumuh.**

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budiharto, W., & Suyantoro, S. (2010). *Robotika : teori dan implementasinya*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (2016). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurdin, A. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makasar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Hasanudin: Makasar
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- V, W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan dan Keputusan

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161842/pp-no-12-tahun-2021>
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. (2019). <https://indok3ll.com/keputusan-menteri-lingkungan-hidup-nomor-112-tahun-2003/>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.1 tahun 2014 tentang standar pelayanan

minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. (2020).
<https://perkim.id/rp2kpkp/dasar-hukum-rp2kpkp/>

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru (2021)
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/233459/perwali-kota-banjarbaru-no-74-tahun-2021>

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan. UU ini mencabut ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan dalam UU Nomor 25 Tahun 1956, UU Nomor 21 Tahun 1958, dan UU Darurat Nomor 10 Tahun 1957(2022)
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/202556/uu-no-8-tahun-2022>

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, (1999)
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45289/uu-no-9-tahun-1999>

Artikel dan Jurnal

Abdurrahman, & Suriyani, E. (2022). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 1-14.

Atmoko, P. H. (2014). Strategi Peembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Wisata*, 146-154.

Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program KOTAKU Dalam Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Civic Education*, 277-286.

Harun, N. I., & Haras, K. T. (2019). Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Public Administration Studies*, 41-51.

Maharani, L. A., & Umila, E. (2014). Tipologi Permukiman Kumuh Di Pinggiran Selatan Kota Surabaya. *JURNAL TEKNIK ITS*.

Rosyadi, A. R., & Mahreda, E. S. (2021). Dampak Program Kampung Pelangi Terhadap Status Cemar Sungai Kemuning Berdasarkan Parameter Limbah Domestik. *Enviro Scienteeae*, 9-20.

Website

Aji, A. P. (2018). *Kajian Karakteristik Permukiman Di Kampung Srirahayu Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas*. Dipetik April 11, 2023, dari repository ump: <https://repository.ump.ac.id/10657/1/AGUNG%20PRI%20AJI%20COVE%20R.pdf>

- Astuti, N. F. (2021, Mei 19). *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Berikut Contoh Rencananya*. Dipetik April 11, 2023, dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencanya-kln.html>
- Nailufar, N. N. (2020, April 10). *Pengertian dan Jenis-jenis Sungai*. Dipetik Januari 11, 2023, dari KOMPAS.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/10/200000969/pengertian-dan-jenis-jenis-sungai>
- RI, S. W. (2014, Desember 02). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034*. Dipetik Januari 11, 2023, dari Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/214043/perda-kota-banjarbaru-no-13-tahun-2014>